

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pendapat, bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Suatu pemerintahan yang baik menuntut seluruh pemerintah bekerja secara profesional dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, secara transparan dan berkualitas kepada publik. Oleh sebab itu, yang membuat ketidakpuasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah.

Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri karena semakin banyaknya instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih baik. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengintegrasikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/progam/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Oleh karena itu di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah diberlakukannya INPRES No. 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES tersebut menjelaskan bahwa mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Serta pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi

dan misi organisasi.

Kasus kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, akuntabilitas politik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk mencapai sasaran dan tujuan sehingga dapat menciptakan good governance. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan.

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, menurut Mardiasmo (2006) anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan anggaran. Goal Setting Theory menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik, salah satu contoh fenomena yang sering terjadi dalam kejelasan sasaran anggaran adalah adanya dana anggaran yang diselewengkan dan tidak tepat dalam sasaran dan salah satu contoh kasusnya adalah Penyelewengan dana desa oleh seorang kepala kampung Rekso Binangun, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) (Kompas.Tv),

Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari suatu rencana yang teratur dengan baik untuk mencatat transaksi keuangan serta memastikan kendalanya, mengamankan dan mengendalikan aset negara. Adanya pengendalian akuntansi dapat memperkirakan masa depan atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari aktivitas organisasi. Sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sistem pengendalian

intern sangat penting bagi instansi pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menerapkan sistem pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing sehingga seluruh kegiatan instansi dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif serta dapat mencapai tujuannya. Sistem pengendalian intern diharapkan dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem pengendalian intern juga dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya.

Fenomena yang terjadi dalam sistem pengendalian internal salah satunya adalah meningkatnya kasus fraud di tanah air yang banyak melibatkan pihak swasta. Sekalipun pengawasan intern telah ada, tetapi kasus fraud korupsi terjadi di lingkungan pemerintah, mengutip dari Serambinews.com - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Ditreskrimsus, Rabu (3/11/2021) ikut menahan MH, yang merupakan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Penahanan tersebut dilakukan, karena yang bersangkutan ikut terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pengadaan bebek Tahun Anggaran 2019. (Serambinews.com)

Penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran dan sistem pelaporan di suatu

instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah dan sistem pelaporan yang kurang efektif kerap terjadi dan muncul kepermukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemimpin daerah. Berbagai kasus terkuak ke publik dan terjadi di kotakota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyerapan anggaran pada instansi pemerintah umumnya masih rendah.
- b. Adanya penyimpangan dalam sistem pengendalian internal di instansi.
- c. Adanya penyelewengan dalam sasaran anggaran, yang mengakibatkan anggaran tidak tepat sasaran.
- d. Minimnya transparansi dalam dana anggaran
- e. Kejelasan sasaran anggaran sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka fokus pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pengendalian internal yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Instansi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara?
- b. Apakah Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara?
- c. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara?
- d. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

1.6 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang penulis harapkan pada penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntabilitas kinerja.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah pusat atau daerah agar dapat memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya